



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

GEDUNG NUSANTARA I, DPR/MPR-RI, JL JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270
Telp. (021) 575 5531 - 575 5497 - 575 5498 - 575 5487 - Fax. (021) 575 5532
E-mail : fraksi_ppp@dpr.go.id / fppp_dpr_ri@yahoo.com / set_fppp@dpr.go.id



**PENDAPAT AKHIR MINI
FRAKSI FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAS UNDANG
UNDANG NO. 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN**

Disampaikan pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Rabu, 1 Desember 2021
Oleh Juru Bicara Fraksi PPP : Dr. Muhammad Aras, S.Pd. MM
Anggota DPR RI Nomor : A-477

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Rapat,
Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI,
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri RI,
Yang terhormat Menteri Keuangan RI,
Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Yang terhormat Menteri Perhubungan RI,
Yang terhormat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI,
Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI
Yang terhormat Anggota Komisi V DPR RI.
Dan hadirin yang berbahagia

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi DPR RI dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi Fraksi Terhadap RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi akhir zaman dan pembawa risalah jalan kebenaran bagi umat manusia.

Yang terhormat Pimpinan Sidang,

Dalam kesempatan rapat kerja Komisi dan penyampaian Pendapat Mini Fraksi yang berbahagia ini, perkenankan Fraksi PPP DPR RI menyampaikan beberapa pendapat terkait RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

1. Pembangunan nasional adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas masyarakat Indonesia yang makin maju dan berkeadilan. Pembahasan terhadap RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang *Insyah Allah* sebentar lagi akan disetujui menjadi UU, adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mewujudkan kemajuan tersebut. Pembangunan yang kita jalankan bersama bukan hanya untuk yang tinggal di kota-kota tapi untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di pedesaan, di daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan maupun Kawasan perbatasan. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia, diseluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan jalan, dan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata.
2. Fraksi PPP menyadari bahwa selama pembahasan terhadap RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan banyak pemikiran dan masukan yang bersifat terobosan guna meningkatkan peringkat daya saing infrastruktur Indonesia, khususnya terkait infrastruktur jalan. Fraksi PPP terus mendorong pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur tidak semata untuk mengejar pertumbuhan dipusat-pusat ekonomi produktif namun juga berfungsi memenuhi kebutuhan redistribusi kesejahteraan di Kawasan-Kawasan yang sedang berkembang atau tertinggal guna mengurangi kesenjangan. Disinilah perlu adanya keterpaduan dalam perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
3. Fraksi PPP menyadari bahwa tuntutan masyarakat tentang perlunya prasarana jalan yang memadai dan pergerakan transportasi yang terus meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan nasional, menuntut pula perubahan payung hukum yang lebih aspiratif dan komprehensif dalam pengaturan tentang jalan. Tujuan pengaturan jalan adalah untuk mengatur tentang penyelenggaraan jalan sebagai prasarana transportasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan peran penting mendukung ekonomi, sosial budaya, pemerataan pembangunan dan memperkokok kesatuan nasional
4. Pembangunan infrastruktur jalan juga memiliki hubungan timbal balik dengan pengembangan ekonomi makro, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui *multiplier effect*. Akibat kurangnya infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia gagal mencapai potensi penuh dan menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).
5. Selama pembahasan, Fraksi kami berupaya mendorong agar RUU ini memberi perhatian kepada kerusakan-kerusakan jalan yang berada di pusat-pusat produksi, kawasan perkebunan dan kawasan pertambangan yang pengangkutan hasilnya tersebut menggunakan mobil-mobil dengan beban yang besar tanpa memperhatikan kemampuan kapasitas jalan sehingga jalan-jalan yang ada di daerah-daerah mengalami kerusakan berat. Terhadap hal tersebut, Fraksi PPP meminta agar pihak swasta yang bersangkutan wajib bertanggung jawab guna memperbaiki setiap kerusakan yang timbul pada jalan-jalan yang dilalui oleh armada angkutan perusahaan yang bersangkutan.
6. Pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat di pedesaan sangat bergantung pada dukungan jalan yang memadai untuk sarana prasarana produksi. Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi PPP telah mengusulkan perlu pengaturan secara detail untuk mendukung pembangunan jalan-jalan di pedesaan.

7. Penting untuk menekankan perubahan paradigma, bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam fasilitas Jalan tidak hanya sebagai standar yang harus dipenuhi, namun juga merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, termasuk waktu tanggap (quick time respons) dalam penanganan hambatan lalu lintas. Selain itu, Penyelenggara Jalan wajib memenuhi SPM yang penerapannya dievaluasi secara berkala setiap tahun. SPM Jalan Tol meliputi kondisi Jalan Tol; prasarana keselamatan dan keamanan; dan prasarana pendukung layanan bagi pengguna Jalan Tol. Selain itu, hasil evaluasi SPM Jalan Tol merupakan informasi publik.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,
Yang terhormat Saudara Menteri, dan
Saudara Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia.

Demikianlah penyampaian Pendapat Mini Fraksi terhadap RUU ini, selanjutnya dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan menyetujui RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan untuk disahkan menjadi UU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian saudara pimpinan dan para anggota, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Bangsa Indonesia diberikan kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi berbagai masalah dan mampu mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin.

Wallahulmuwaffiq Ilaa Aqwamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 1 Desember 2021
PIMPINAN
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Sekertaris


Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos.,M.Si

